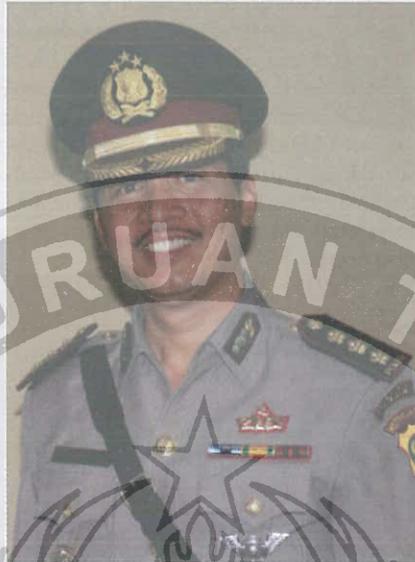


TEROBOSAN SPEKTAKULER

MENGENAI komitmen peningkatan layanan cepat berkaitan dengan Quick Win ini telah terlihat di beberapa Polda. Berkaitan dengan transparansi terhadap penerbitan administrasi penerbitan SIM, STNK dan BPKB, pada saat sekarang ini sudah jauh lebih mudah, cepat dan transparan, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Quick Win" ditunjukkan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan sebuah terobosan yang cukup spektakuler. Mulai bulan Februari lalu, seluruh kantor Samsat di wilayah Jakarta memberi kemudahan dalam mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak pakai acara berlama-lama. Di kantor Samsat Jakarta Pusat dan Utara di Jalan Gunung Sahari, misalnya, poses perpanjangan STNK hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Samsat Jakarta Timur beda lagi. Selain memberikan pelayanan yang cepat, juga menyediakan hadiah berupa cinderamata bagi wajib pajak yang beruntung. "Wajib pajak yang beruntung akan mendapatkan cinderamata dari kami," kata Kasubsi Samsat Jakarta Timur, AKP Nurdin Loppe.

Polda Metro Jaya juga memberi kemudahan pelayanan dalam pengu-
rusan Surat Tanda Nomor Kendaraan



(STNK) bagi para pemilik kendaraan berpelat B atau wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mulai Februari lalu, masyarakat dapat mengurus perpanjangan STNK melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pelayanan ini merupakan bagian dari program Quick Win (pelayanan cepat) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Januari lalu.

Menurut Dir Lantas SP Polda Metro Jaya, Kombes Pol Drs Condro Kirono,

kecepatan pelayanan ini dilakukan sesuai dengan penjabaran program kerja akselerasi Kapolri, Jenderal Pol Drs Bambang Hendarso Danuri. Bahwa program Quick Win dicanangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat serta tidak berbelit-belit kepada masyarakat.

"Kapolri berharap dengan Quick Win ini Polri akan lebih mandiri, profesional dan dipercaya serta dicintai masyarakat. Untuk itu kami akan berusaha terus memberikan inovasi dalam pelayanan dan tentu saja kami juga siap dikritik, karena kami belum sempurna melayani masyarakat," kata Condro Kirono

EMPAT PRIORITAS KERJA

KOMITMEN peningkatan layanan cepat berkaitan dengan Quick Win ini juga terlihat di beberapa daerah. Berkaitan dengan transparansi terhadap penerbitan administrasi penerbitan SIM, STNK dan BPKB, pada saat sekarang ini sudah jauh lebih mudah, cepat dan transparan, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk membuktikan hal itu, Kabag Bintibluh Biro Binamitra Polda Riau AKBP Drs Sumardi yang juga Dosen Kriminologi Fisipol UIR mempunyai pengalaman sendiri. "Setelah dibukanya Samsat Corner di Mal SKA Pekanbaru, pada 17 Oktober 2008 siang hari, saya mencoba mengurus sendiri perpanjangan STNK roda dua di Samsat Corner tersebut," tuturnya.

AKBP Drs Sumardi sengaja datang berpakaian seadanya serta memakai sandal karena berniat sambil jalan-jalan di Mal SKA. Ketika mendaftarkan diri dengan segala persyaratan yang telah saya penuhi, berkas diterima dengan ramah oleh petugas PNS-Polri yang kebetulan tidak mengenal saya, sedangkan petugas dari anggota Polri tidak ada, yang ada petugas lain dari PT. Jasa Raharja dan dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Tak berapa lama setelah berkas tersebut diteliti dan dicatat kemudian

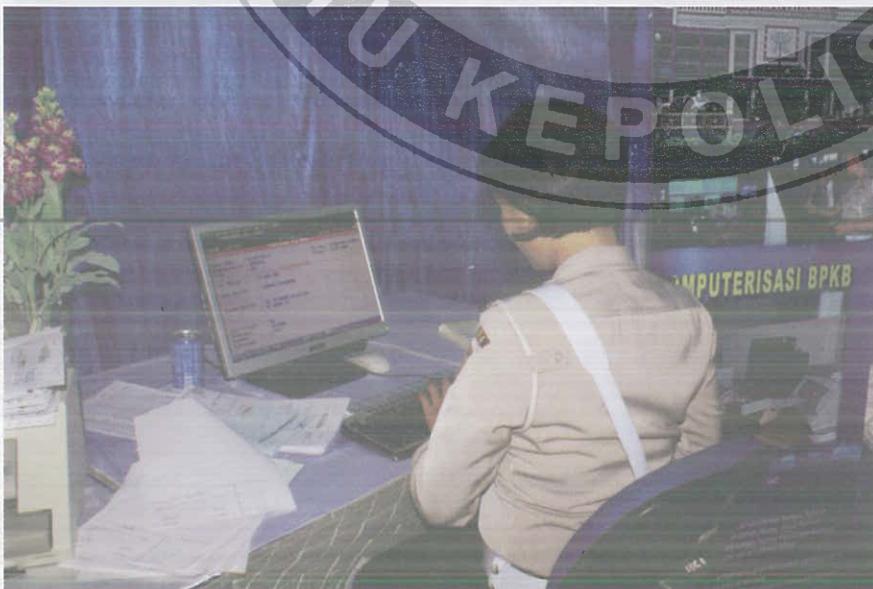


FOTO: JETE/EVA

diserahkan ke petugas berikutnya dan saya dipanggil untuk membayar pajak. Sambil menyerahkan uang saya sampaikan, saya tinggal saja dulu karena mau jalan-jalan di Mal SKA. Ternyata petugas gabungan tersebut mengatakan ditunggu saja karena tidak lama, sambil menyerahkan uang kembalian sebesar lima ratus rupiah. Saya kaget karena walaupun hanya lima ratus rupiah uang kembalian tetap diserahkan, lebih tercengang lagi karena tak sampai sepuluh menit urusannya selesai, STNK asli saya itu sudah diparaf dan dicap sebagai tanda pengesahan.

Berkaitan dengan transparansi bidang penyidikan melalui SP2HP, warga masyarakat sebetulnya juga bisa memanfaatkan keberadaan PKIK Poltabes

Pekanbaru dengan cara menghubungi 112 atau melalui jaringan internet yaitu dengan mengakses informasi mengenai reserse dan kriminal melalui website. Sedangkan transparansi di bidang rekrutmen personel, untuk menjadi anggota Polri baik Bintara, penerimaan Taruna Akpol maupun Pendidikan Perwira Sumber Sarjana (PPSS) telah berlangsung secara transparan dan diketahui oleh publik. Hal ini karena pada saat seleksi, institusi di luar Polri baik dari instansi pemerintah, LSM maupun dari unsur mahasiswa dilibatkan dan melihat secara langsung proses seleksi dari tahap pendaftaran sampai pengumuman hasil seleksi.

Hal yang sama juga berlangsung di Madiun, Jawa Timur. Ada empat

prioritas kerja dalam program Quick Win di Madiun. Yakni, kegiatan patroli Samapta, kepengurusan surat kendaraan bermotor oleh Satlantas. Selain itu, juga penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2H) dan transparansi rekrutmen anggota Polri.

Tentu saja, program Quick Win tidak bisa sertamerta secara langsung begitu saja diterapkan dalam waktu dekat, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu antara tiga sampai dua belas bulan untuk melaksanakannya secara terus-menerus, sampai semua hasilnya tentang kinerja Polri dapat dirasakan oleh masyarakat.

SPIRIT QUICK WIN DI SEJUMLAH POLDA

TIGA bulan sudah sejak Quick Win digulirkan. Sejauhmana pelaksanaannya? Berikut adalah spirit yang mewarnai pelaksanaan Quick Win di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jatim dan Polda Riau.

POLDA METRO JAYA URUS PAJAK KENDARAAN 15 MENIT

SPIRIT "Quick Win" ditunjukkan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan sebuah pelayanan yang membuat masyarakat puas senang. Bagaimana tidak, mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) di seluruh kantor Samsat Jakarta (Pusat, Utara, Timur) i hanya membutuhkan waktu 15 menit!

Harapan kapolri -dan harapan seluruh jajarannya --- nampaknya sudah mulai terlihat dengan adanya sejumlah reaksi positif dari sejumlah warga Gunung Sahari, Jakpus yang mengaku sangat gembira memperoleh pelayanan yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Seorang warga bernama Tedy, bahkan menunjukkan kepuasan dan simpatinya dengan cara memberikan sebuah bingkisan makanan kepada Polantas. "Inilah bentuk rasa simpati saya karena mendapat kemudahan dalam memperpanjang STNK," ucapnya.

Ekspresi kepuasan yang sama juga

dirasakan M Simbolon, (40), seorang guru sebuah SMP di bilangan Jakarta Pusat yang Senin siang itu mengurus STNK kendaraan roda empatnya yang hilang. Suguhan kopi dan air mineral gratis bagi warga yang mengurus surat-surat kendaraannya di Kantor Samsat Jakpus, nyaris membuatnya "tidak percaya". "Wah ini sebuah kejutan. Ngurus STNK-nya cuma 15 menit dapat kopi pula," katanya

Samsat Jakarta Timur beda lagi. Selain memberikan pelayanan yang cepat, juga menyediakan hadiah berupa cinderamata bagi wajib pajak yang beruntung. "Wajib pajak yang beruntung akan mendapatkan cinderamata dari kami," kata Kasubsidi Samsat Jakarta Timur, AKP Nurdin Loppe.

Urus STNK Lewat ATM

Para pemilik kendaraan berpelat B atau wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Anjungan Tunai Mandiri

(ATM) mulai Senin (2/2). Pelayanan ini merupakan bagian dari program quick wins (pelayanan cepat) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Cara mengurusnya cukup mudah. Pemilik kendaraan terlebih dahulu membawa surat setoran pajak daerah ke kantor samsat Kepolisian Daerah Metro Jaya. Lalu melakukan transaksi pembayaran via ATM. Bukti setoran pajaktersebutkemudiandibawakembali ke samsat guna proses pengambilan STNK yang sudah diperpanjang.

Bila tidak sempat ke Polda Metro Jaya, pemilik kendaraan juga bisa mengurusnya di di Mal Arta Gading, Jakarta Utara, dan Mal Taman Palem, Jakarta Barat. Di kedua mal itu sudah disediakan gerai samsat tidak jauh dari ATM. Namun, pembayaran pajak STNK baru bisa melalui Bank DKI.

Warga pun memberikan tanggapan positif terhadap inovasi polisi ini. "Saya merasa lebih praktis. Ga harus berjubel di kasir," ujar salah seorang



pemilik kendaraan. Perkembangan ke depan, Polri akan membuat sistem yang memungkinkan pemilik kendaraan membayar pajak melalui ATM dan langsung memperoleh STNK yang sudah diperpanjang dari ATM tersebut.

Reskrim Unggulkan Website Satu lagi layanan cepat Polda Metro Jaya, yaitu diresmikannya website www.reskrimum-metro.org. Situs itu dibuat untuk mengetahui status sebuah kasus yang sedang ditangani polisi. "Ini merupakan program kerja akselerasi transformasi menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat," kata Direktur Reskrimum Polda Metro

Jaya Kombes Pol Muhammad Iriawan, beberapa waktu lalu.

Layanan unggulan Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu dapat membantu masyarakat yang ingin mengecek perkembangan dan proses penyidikan satu kasus secara online, termasuk adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2H). Program SP2HP online ini dapat diakses masyarakat sejak dua bulan lalu. "Hanya saja untuk sementara, layanan SP2HP baru bisa diakses untuk perkara yang ditangani Polda," jelasnya.

POLDA JATIM OPTIMALKAN TEKNOLOGI DAN VIDEO STREAMING



AKSELERASI program Quick Win dijawab oleh Polda Jawa Timur (Jatim) dengan mengoptimalkan perangkat teknologi informasi (IT) yang diaplikasikan dalam bentuk situs yang memberitakan semua perkembangan kinerja polisi, mulai pengurusan SIM, STNK, penyidikan perkara dan lainnya. Melalui website resmi yaitu www.jatim.polri.go.id masyarakat bisa melihat sekaligus menanyakan perkembangan perkara yang sedang disidik melalui situs ini.

"Semua perangkat IT ini kami bangun untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kinerja personil di jajaran Polda Jatim sendiri," kata Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. H. Anton Bachrul Alam, SH, akhir Februari lalu.

Perintisan Quick Win di Polda Jatim juga sudah sampai ke tingkat Polres. Polresta Madiun, misalnya, sudah me-launching Quick Win pada 22 Februari 2009. "Ini merupakan bentuk pelayanan terpadu yang efektif bagi masyarakat," kata AKBP Setija Junianta, Kapolresta Madiun.

Pemberlakuan program ini dilaksanakan di Polresta Madiun yang beker-

jasama dengan operator telepon, serta memasang 'video streaming' mulai 22 Februari 2009. "Ini merupakan bentuk pelayanan terpadu yang efektif bagi masyarakat," kata AKBP Setija Junianta, Kapolresta Madiun, usai kegiatan implementasi Polmas dengan Komunitas onthelis "Madiun Tempo Doeloe", saat launching di Madiun.

Menurut Setija, warga bisa melakukan pengaduan singkat melalui SMS dengan nomer 7640000 hasil kerja sama dengan PT Telkom Madiun. Tidak ha-

nya itu, Polresta juga memasang "video streaming" di sejumlah jalan strategis di wilayah Kota Madiun.

Saat menerima SMS, petugas operator Polresta Madiun akan meneruskan ke satuan yang berwenang. Setija mencontohkan, adanya informasi balap liar di ring road. Maka, operator akan mengirim ke HP Kasatlantas, Satintelkam dan Kapolsek Manguharjo. "Petugas akan mengecek kebenaran laporan tersebut dan SMS kami terima 24 jam," ujarnya.



POLDA JAWA BARAT PATROLI MOBIL DAN MOTOR PEMBURU

PENERAPAN Quick Win Polda Jawa Barat diwujudkan dengan melepas 100 unit motor "Quick Respon" dari Polwiltabes Bandung. Setiap hari, motor yang diawaki dua orang petugas tersebut akan melakukan patroli di sejumlah strong point yang ada di wilayah kota Bandung. Titik yang bukan saja rawan terhadap gangguan kejahatan jalanan, melainkan juga lokasi-lokasi yang rawan macet. Motor-motor polisi yang digunakan sebagai patroli ini adalah jenis motor besar, motor trail dan motor city cruiser.

"Pengerahan patroli motor ini merupakan bentuk respon kami terhadap keluhan masyarakat sekaligus rangkaian dari quick respon Polwiltabes Bandung," jelas Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol Imam Budi Supeno.

Menciptakan rasa aman, merupakan tugas dan tanggungjawab polisi yang harus segera diwujudkan dalam action nyata. Jadi, pengerahan unit patroli motor yang bertugas mobile selama 24 jam tersebut, katanya merupakan sebuah jawaban atas keinginan masyarakat tersebut. "Inilah respon kami, semoga masyarakat memanfaatkannya karena patroli motor ini tidak sekedar mengejar kasus-kasus berbau pidana,



tapi masalah lalu lintas juga menjadi bagian dari tugas patroli ini," kata Kombes Pol Imam Budi Supeno. Pengerahan patroli motor ini, kata Imam, dimaksudkan untuk mem-backup 29 unit mobil patroli polisi yang sudah lebih dulu dioperasikan Polwiltabes Bandung semasa Kapolwilnya dijabat Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana.

Mobil patroli yang dilengkapi dengan perangkat teknologi Global Positioning System (GPS) ini sebanyak 6 unit berada di Polwiltabes Bandung, 9 di Polresta Bandung Barat, 8 di Polresta Bandung Tengah dan 6 di Polresta Bandung Timur. "Patroli dengan motor mereka lebih mobile, lebih lihai bergerak menghindari kemacetan. Mereka bisa berperan sebagai tim pemburu keja-

hatan dan lebih cepat tiba di TKP," jelas Imam Budi Supeno.

Tentang cara kerja kendaraan patroli ber-GPS itu, seperti dijelaskan Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana (ketika masih menjabat Kapolwiltabes Bandung, saat ini Kabid Penerangan Umum Humas Mabes Polri, Red), adalah menerima arahan dari petugas call centre 112 yang menerima laporan masyarakat. Setelah laporan diterima, petugas segera memerintahkan mobil patroli yang terdekat untuk segera meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai laporan.

"Saat ini kita mampu merespon dalam waktu 15 menit, tapi ke depan bisa 10 bahkan 5 menit dengan catatan kondisi jalan normal dan tidak macet," katanya seraya menambahkan kejahatan jalanan di Bandung yang angkanya cukup tinggi, menjadi sasaran utama pencaangan program ini. GPS yang dioperasikan di lingkungan Polri tersebut, kata Ketut Untung Yoga, ke depan, implementasinya tidak hanya dimanfaatkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Ada manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu bisa dimanfaatkan untuk memantau kinerja polisi di lapangan. "Jika ada polisi yang bilang mau ke TKP, nyatanya tidak, itu akan ketahuan," katanya.



POLDA RIAU PUSAT KENDALI DAN INFORMASI KEPOLISIAN

PEKANBARU juga menyediakan layanan 112m yang dikendalikan dari Pusat Kendali dan Informasi Kepolisian (PKIK). Kabag Bintibluh Biro Binamitra Polda Riau, AKBP Sumardi, yang juga dosen Kriminologi Fisipol UIR, mengatakan, cukup dengan menekan 112 dari telepon rumah atau telepon umum, operator PKIK akan melayani telepon yang masuk. Atau kalau melalui SMS, ketika ltspkp spasi isi pengaduan (maksimal 160 karakter, kirim ke nomor 1717), juga melalui layanan website: www.poltabespekanbaru.com dan email: pkik@poltabespekanbaru.com, atau

melalui layanan radio dualband frekuensi 14.600 dengan call sign untuk PKIK adalah call centre.

Sayangnya, layanan tersebut belum direspon secara baik oleh masyarakat Pekanbaru. Kebanyakan mereka meskipun tahu ada kejadian cenderung enggan melaporkan. "Kalau pun melapor pasti sudah sangat terlambat beberapa jam bahkan beberapa hari setelah kejadian," jelas AKBP Sumardi. Padahal, lanjutnya, kalau segera dilaporkan, khususnya untuk peristiwa pidana, petugas bisa membekuk pelakunya hanya dalam hitungan jam.



KAPOLDA YANG MENGAWALI QUICK RESPON DI INDONESIA

MENIADAKAN APEL PAGI, MENYEBAR ANGGOTA KE JALAN

NAMA Brigjen Pol Drs Bekto Suprpto MSi, barangkali jarang-jarang disebut, sebelum dipercaya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, 8 Maret tahun lalu. Genap setahun, menjabat, Bekti Suprpto pun menorehkan prestasi. Di antaranya berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari Rp10 miliar, dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk penanganan korupsi sebesar Rp160 juta. "Dengan DIPA Rp160 juta Polda Sulut telah menyelamatkan uang negara Rp10 miliar lebih," kata Kabid Humas Polda Sulut AKBP Benny Bella seperti dilansir sebuah media online.

Dana ini dikembalikan koruptor ke kas negara setelah tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulut menemukan bukti-bukti kuat. Ia menegaskan, komitmen memberantas korupsi ini sesuai instruksi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso menindaklanjuti program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kasus-kasus korupsi yang ditangani antara lain dugaan penyimpangan di DPRD Talaud, SPPD-gate di Dekot Manado, dan Persibom-gate. Ada juga kasus illegal fishing dan penangkapan mobil bodong. "Polda Sulut satu-satunya Polda setanah air yang menangani kasus ilegal fishing," ungkap Bekto.

Selain memberantas korupsi, Polda Sulut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat mulai menjalankan tugas sebagai Kapolda Sulut 8 Maret 2008, Bekto Suprpto meniadakan apel pagi tapi memerintahkan anggota langsung



bertugas, terutama mengatur lalu lintas. Maka, sejak pukul enam pagi, polisi lalu lintas pun banyak tersebar di jalan jalan, sebuah pemandangan yang melegakan masyarakat. **A - WASPADA**

"Kami senang karena mengantar anak ke sekolah di pagi hari sudah tak macet lagi. Teratur, tidak semrawut dan aman di jalan," kata Ny Maria Paulus, seorang ibu yang tinggal di Malayayang, Manado. "Hujan sekalipun polisi sudah ada sejak pagi hari. Kami aman mengantar anak ke sekolah," ujar Ny Markus, warga Paal 2 Manado yang setiap hari mengantar anaknya ke salah satu SD di pusat kota

Program yang paling direspon positif masyarakat adalah quick respon. Program ini diluncurkan sebulan setelah Bekto mengendalikan Polda Sulut. "Melalui quick respon polisi sudah ada di tempat kejadian perkara (TKP) kurang dari 10 menit," kata Bekto saat peluncuran kegiatan ini, April 2008. Quick Respon dilaksanakan bersamaan

dengan program "Hallo Polisi". Masyarakat bisa menghubungi atau mengontak polisi jika ada kejadian melalui nomor layanan telepon atau SMS. Begitu mendapat laporan lewat telepon atau SMS itu, polisi langsung ke TKP maksimal 10 menit. "Kami ingin menekannya lagi menjadi sekitar 5-8 menit," kata Bekto.

"Program Halo Polisi sangat positif. Sekarang bila ada gangguan, cukup telepon, tak sampai 10 menit sudah di lokasi," kata Ny Mathilda Kumontoy, ibu rumah tangga yang mengaku menyimpan semua nomor quick respon polisi.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso belum lama ini meluncurkan program Quick Win yang diakselerasikan ke dalam empat program unggulan, yaitu Quick Respon, Transparansi Penyidikan, Transparansi dan Percepatan Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Transparansi Penerimaan Calon Anggota Polri. "Di lingkungan Polda Sulut keempat program ini sudah dilaksanakan hampir satu tahun lalu," kata Benny Bella.

Terobosan Bekto Suprpto meluncurkan program quick respon memperoleh respon yang sangat tinggi dari masyarakat. Respon ini mereka wujudkan dengan menyumbangkan 253 sepeda motor, sebagai bentuk partisipasi. "Semua sepeda motor itu langsung didistribusikan ke Poltabes/Polres/Polresta se-Sulut untuk memperlancar program 'Patroli Kampung' dan quick respon," kata Bella. "Semua hibah sepeda motor itu sudah diserahkan kepada negara,"

katanya.

Program quick respon di lingkungan Polda Sulut kini sudah menjadi rujukan dan model bagi beberapa polda.

"Dengan program Quick Respon dan Hallo Polisi sekarang kampung-kampung yang rawan gangguan Kamtibmas di malam hari sudah relatif aman. Masyarakat tak perlu takut pulang larut malam," kata Kombes Pol Carlo Tewu, salah satu anggota tim sosialisasi Mabes Polri kepada wartawan di Sulut dalam kesempatan kunjungan ke beberapa polres/polresta dan poltabes di lingkungan Polda se-Sulut.

Secara internal Polda Sulut juga terus berbenah. Polisi yang tak tertib berlalu lintas, mabuk-mabuk di tempat umum, terlibat tindakan amoral dan asusila ditindak tegas. Sudah banyak oknum polisi yang dipecat. "Mudah-mudahan ini membuat polisi makin baik, walaupun tidak 100 persen langsung membaik," kata Bekto.

Mantan Komandan Detasemen Khusus (Densus) 88, pasukan elit Polri anti teror, ini juga gencar melaksanakan program memperbaiki citra polisi. "Perbaiki citra itu paling efektif lewat keteladanan," katanya. Tak heran, Bekto dikenal sebagai pejabat paling "tepat waktu" di Sulut saat ini. Sepu-



luh menit sebelum dimulai, suami Dr Dewi Suprpto ini sudah tiba di tempat acara. "Kita harus memulai dengan disiplin waktu untuk mengubah aspek yang lain," katanya saat berkunjung ke Manado Post, sepekan setelah bertugas di Sulut.

Perwira yang disegani polisi mancanegara ini tak memerlukan waktu yang banyak untuk bisa menguasai persoalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulut. Belum cukup sebulan bertugas di daerah "Nyiur Melambai", Bekto membekuk sendiri kepemilikan

senjata ilegal yang dimiliki seorang anggota Dekab Minahasa Utara. Walau sibuk dan padat kegiatan, Bekto menyempatkan waktu rutin mendonorkan darahnya. "Donor darah itu memberi tanpa merasa kehilangan," katanya.

Dan akhirnya, berkaitan dengan dugaan penggunaan SPPD fiktif yang banyak terjadi di lembaga legislatif, dia memerintahkan Polres/Poltabes/Polresta se-Sulut mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

[JT 02]



TENTANG DARURAT 112

PROSEDUR memanfaatkan layanan berupa sambungan telepon CALL CENTRE 112 ini sangat mudah dan cepat. Anda tak perlu khawatir bakal di-ping-pong sana-sini oleh petugas karena saluran tiga digit ini diprogram khusus agar Anda berbicara langsung dengan petugas yang berjaga. Kalau melapor, Anda pun tak perlu capek dan kesal menunggu karena dalam tempo 15 menit saja petugas akan tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai laporan. Mungkin ada pertanyaan, kalau jarak tempuh Anda dengan petugas puluhan kilometer, 15 menit apakah cukup? Tidak masalah, karena petugas 112 tidak bekerja sendiri, tapi dibantu mobil patroli yang dilengkapi dengan perangkat teknologi Global Positioning Global (GPS). Segera setelah menerima laporan, petugas 112 akan menghubungi mobil patroli yang posisinya mendekati TKP.

Satu kemudahan yang perlu diketahui, segala jenis telepon bisa menghubungi nomer ini, baik CDMA, GSM, maupun telepon kabel dari rumah. Kalau menelpon menggunakan telepon lokal

dan CDMA, Anda akan terhubung langsung dengan kantor polisi terdekat sedangkan kalau menggunakan telepon GSM, secara otomatis Anda akan dilayani petugas yang berada di Polda Metro Jaya.

Lewat saluran ini, beragam masalah bebas dilaporkan. Mungkin Anda merasa tidak aman di rumah sendirian? Pasangan suami isteri sebelah rumah bertengkar hebat? Melihat Ibu dari teman-putri Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Atau ada preman kampung yang hobinya memalak-puteri Anda yang pulang kuliah malam? Menjadi saksi korban tabrak lari, pencopetan atau perampokan? Kalau Anda, teman, saudara, orangtua kebetulan terlibat dalam sebuah kasus dan Anda ingin tahu sampai sejauhmana kasus tersebut ditangani petugas, tinggal pencet **Darurat 112**.

Dan kalau Anda dalam posisi pelapor, penting juga diketahui identitas Anda akan disimpan rapi di kantor polisi. Artinya Anda akan aman-aman saja. Satu lagi, Anda pun tidak perlu khawatir

bakal dibebani biaya, baik dalam posisi pelapor, saksi, korban, atau kalau pada akhirnya menjadi tersangka. Negara sudah menyiapkan anggaran khusus untuk itu. Jadi, tak mungkin lagi Anda bakal mengalami nasib sial: *Lapor kehilangan ayam kok jadinya malah kehilangan kambing.....!*

Program ini secara bertahap bakal diterapkan di seluruh polda di Indonesia. Hanya saja dengan kemudahan akses meminta bantuan polisi tersebut, tidak serta-merta polisi menerima setiap laporan, karena ada saja yang iseng dan ingin mengelabui petugas dengan laporan palsu. Kalau Anda orangnya, sebaiknya segera urungkan niat tersebut karena akan sia-sia.

Mengapa? Sebab lewat perangkat pelacak berbasis GPS, siapapun yang menghubungi polisi lewat jaringan ini dapat 'terlihat' letak dan posisi keberadaannya. Karena perangkat GPS ini juga terpasang di mobil patroli polisi, maka polisi yang bertugas dalam mobil ini pun tidak bisa "main-main" karena komandan satuan bisa memantaunya setiap waktu. *****

AKBP GIRI PURWANTO: KAMI SUDAH LAMA MEREFORMASI DIRI

foto: SSB



PERUBAHAN merupakan aspek penting yang perwujudannya selalu dinanti-nantikan masyarakat. Dan Polri menjawab keinginan masyarakat tersebut melalui tiga aspek penting, yakni perubahan struktural, instrumental dan kultural. Pelan tapi pasti Polri terus berupaya me-reformasi diri demi tercapainya target membangun kepercayaan terhadap masyarakat.

Dua aspek di depan barangkali tanpa kendala berarti, namun untuk aspek kultural (dalam rangka mengubah menjadi polisi sipil), memerlukan proses panjang dan bertahap. "Bicara kultur berarti bicara budaya masyarakat, bicara tentang bagaimana mengubah sikap manusia, dimana pelaksanaannya tidaklah gampang," jelas Kabag Reg Ident Polda Metro Jaya AKBP Giri Purwanto.

Pencanangan Quick Win, ujar Giri Purwanto, sesungguhnya untuk mempercepat perubahan tersebut, yaitu sebuah program percepatan yang dibuat khusus untuk memberi pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Pelayanan merupakan aspek terpenting dari seluruh aspek yang menjadi perhatian utama pimpinan Polri sebab langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat.

"Maka komitmen kita adalah harus betul-betul terjadi perubahan pelayanan. Dan bicara tentang pelayanan yang baik, harus dilakukan pula dengan sistem yang transparan, terbuka, sehingga diketahui oleh masyarakat," katanya.

Kalau bicara tentang transparansi pelayanan, sesungguhnya Polda Metro Jaya sudah melakukannya sejak lama, seiring dengan program reformasi tiga aspek yang dilakukan institusi Polri. "Dalam lingkungan pelayanan kita, kita sudah lama mereformasi diri."

Dikatakan, mereformasi diri sudah menjadi komitmen di Direktorat Lalulintas sejak 2005. Reformasi tersebut, katanya, terlaksana dengan baik karena didukung dengan program yang jelas, komitmen tinggi dari pimpinan untuk mengubah system, mengubah sarana dan prasarana (dalam kaitan memfasilitasi, red) berupa perangkat

informasi teknologi.

"Apa yang kami lakukan sepenuhnya didukung fasilitas, sehingga keberhasilan itu bisa dicapai. Kami juga melakukan koordinasi dengan masyarakat media yang berperan mempublikasikan kegiatan sehingga masyarakat bisa melihat apa yang kita lakukan," jelasnya.

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya muncul masalah, adalah hal yang wajar karena memang mata rantainya banyak. Contohnya dalam penerbitan BPKB, aturannya BPKB dibuat dulu baru menyusul STNK karena logikanya, orang kalau mau menggunakan barang maka dia harus memiliki dulu barang tersebut, baru selanjutnya bisa dipakai. Tapi dalam prakteknya, desakan untuk "mendahulukan" STNK dari masyarakat cukup besar sehingga kebijakan pun berubah demi mengakomodir keinginan masyarakat.

Namun sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam pembuatan SIM, STNK dan BPKB saat ini sudah tidak ada lagi masalah. Sekarang ini adalah saatnya mengembalikan mekanisme di mana masyarakat tidak bisa dijadikan alasan lagi, harus ada ketegasan dari aparat. "Karena pada prakteknya, keduanya bisa selesai dalam waktu berdekatan," tandas Giri Purwanto. *****

ZUMROTIN (SEKJEN IOM)

SULIT MENGAKSES INFORMASI KASUS



SAYA memberikan apresiasi terhadap Polri atas peluncuran program Quick Win. Semoga ke depan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jajaran kepolisian makin meningkat. Saya kira untuk pelayanan SIM, STNK dan surat-surat kendaraan lainnya sudah relatif bagus pelayanannya, terlihat jelas kemajuannya bila dibandingkan sebelum reformasi. Bahkan di Jakarta untuk perpanjangan SIM mulai ada layanan "jemput bola" dengan menggunakan mobil dan buka counter di mal-mal.

Saya kira kalau Polri sudah mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tadi dengan baik, seyogyanya masyarakat mendukungnya, mengikuti prosedurnya dan tidak lagi menggunakan calo. Ada baiknya juga bagi mereka yang tidak mau mengurus sendiri dan memilih menggunakan calo diberlakukan ketentuan "waktunya lebih lama dua atau tiga hari dibanding mengurus sendiri. Saya yakin ketentuan ini akan mendorong masyarakat untuk tidak lagi menggunakan jasa calo yang selama ini memberikan image jelek kepada polisi. Dan sebaliknya mereka akan memberikan apresiasi terhadap pelayanan polisi.

Kemudian yang berkaitan dengan rekrutmen calon anggota polisi yang transparan, saya lihat di beberapa daerah juga sudah dimulai meskipun be-

lum menyeluruh dan tidak dilakukan oleh perekrut independent. Saya kira sebaiknya rekrutmen ini dilakukan oleh Assesment Center independen. Sebetulnya yang harus transparan tidak hanya pada rekrutmen calon anggota polisi tetapi juga diberlakukan dalam hal kenaikan pangkat dan penempatan.

Soal quick respon, pelayanan cepat ke TKP juga mulai ada kemajuan meskipun kadang-kadang masih terjadi diskriminatif. Respon polisi yang cepat ke TKP sangat penting karena disamping memberikan rasa aman dan perlindungan

kepada korban juga memudahkan polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kasus-kasus kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penyelundupan dapat cepat terdeteksi.

Dan khusus untuk penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan cepat, saya kira pelayanan ini masih banyak dikeluhkan masyarakat. Kebanyakan masyarakat merasa tidak mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan perkembangan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Bahkan sering kejadian polisi melepas tersangka yang terlibat dalam suatu kasus seperti yang belum lama ini didiskusikan di TV One oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Saya kira hal ini harus menjadi ekstra perhatian bagi Polri karena kalau tidak masyarakat akan menganggap polisi tidak mampu menegakkan hukum, tidak bisa memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat.

Akhirnya, ke empat program unggulan Quick Win harus diwujudkan oleh Polri dan untuk mewujudkannya diperlukan komitmen seluruh jajaran Polri disamping harus didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dan—sebaiknya buatlah istilah program yang mudah difahami masyarakat luas, menggunakan Bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. [Eva]



INTI DARI QUICK WIN

PROGRAM UNGGULAN POLRI DALAM RANGKA MERAIH KEBERHASILAN SEGERA

1. Globalisasi telah membawa perubahan mendasar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Di antaranya, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri selaku pemelihara Kamtibmas – sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum.
2. Polri telah mereformasi diri melalui bijak perubahan instrumental, struktural dan kultural (dalam rangka menjadi polisi sipil) namun hasilnya belum sesuai harapan masyarakat.
3. Demi memenuhi harapan tersebut, maka Polri mempercepat proses reformasi birokrasi, salah satunya melalui program unggulan.

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. Tujuan : Segera meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi (Polri)
2. Sasaran : Mengubah pola pikir dan budaya kerja serta manajemen Polri.

PROGRAM TERSEBUT DI-IMPLEMENTASIKAN MELALUI STRATEGI :

1. Menggunakan pendekatan pragmatis
2. Quick Wins dilaksanakan oleh para pejabat pengambil keputusan di tingkat pusat sampai dengan Satwil dan para pelaksana di lapangan
3. Adanya komitmen seluruh pejabat anggota Polri
4. Sosialisasi internal/eksternal

BENTUK QUICK RESPON PADA MASING-MASING FUNGSI

1. Bidang Samapta
 - Kecepatan datang di TKP (TP/TKP)
 - Kecepatan memberikan bantuan/ pertolongan).
2. Bidang Reserse
 - Kecepatan datang di TKP (olah TKP/ ident labfor)
 - Cepat dan tepat dalam pelayanan penerimaan laporan polisi (saksi di BAP)
 - Kecepatan dalam proses penyidikan tindak pidana
3. Bidang Lalu Lintas
 - Kecepatan datang ke TKP laka lintas
 - Kecepatan memberikan bantuan / pertolongan
 - Kecepatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas
 - Kecepatan pelayanan administrasi lalu lintas
4. Bidang Intelkam
 - Kecepatan pembuatan dan distribusi produk intelkam (Lap Intel, SKCK, SKLD, Kitas, dll)
5. Bidang Manajemen Administrasi
 - Kecepatan pendistribusian surat komplain dari

masyarakat

- Kecepatan pendistribusian logistik untuk dukopsnal (BBM, Harwat, dll) dan kebutuhan anggota (Kaporlap)
- Kecepatan pendistribusian anggaran (Opsnal dan gaji anggota)
- Pelaksanaan pengawasan terhadap giat opsnal maupun pembinaan.
- Transparansi bidang Gakkum:
- Penerimaan pembuatan laporan polisi (LP) di SPK
- Pendistribusian LP kepada Penyidik
- Penyampaian surat panggilan
- Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan
- Pembuatan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor sesuai dengan tahapan penyidikan sejak penilaian laporan samapai dengan berkas perkara/ SP 3
- Pemberkasan pewrkara dalam bentuk BAP
- Penyerahan berkas perkara ke JPU

CATATAN: TERMASUK GAKKUM BIDANG LANTAS TILANG DAN LAKA LANTAS

TRANSPARANSI BIDANG PELAYANAN LANTAS

- Proses penerbitan SIM ((pelayanan pendaftaran di loket, proses ujian teori, proses ujian praktek, proses pemeriksaan kesehatan.
- Proses penerbitan STNK (pelayanan *door to door*, *banking system*, *drive thru*)
- Proses penerbitan BPKB (rasionalisasi pendaftaran kendaraan bermotor).

TRANSPARANSI BIDANG REKRUITMEN ANGGOTA

- Sosialisasi penerimaan anggota Polri (Akpol, PPSS, Bintara)
- Transparansi dalam pendaftaran
- Transparansi dalam pelaksanaan ujian (Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, akademis)
- Pembobotan hasil ujian
- Transparansi pengumuman hasil seleksi

ALASAN PEMILIHAN PROGRAM

Dari uraian di atas akan dipilih program unggulan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Merupakan produk utama Polri
- Mempunyai daya ungkit yang kuat (key leverage)
- Bisa langsung dirasakan oleh masyarakat
- Bisa direalisasikan dan dapat diukur dalam waktu 3-12 bulan

PROGRAM UNGGULAN YANG DIPILIH:

1. Quick respon patroli Samapta

2. Transparansi penerbitan SIM, STNK & BPKB
3. Transparansi penyidikan TP melalui pemberian SP2HP
4. Transparansi rekrutmen anggota Polri (AKPOL, PPSS, Bintara)

**MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM YANG DIPILIH:
QUICK RESPON PATROLI SAMAPTA**

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas polisi umum dalam kecepatan dan ketepatan mendatang TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat melalui kegiatan patroli samapta dan pos mobile sehingga terbangun interaksi positif polisi dan masyarakat.

TRANSPARANSI PEMBUATAN SIM, STNK DAN BPKB

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang berlandaskan asas transparan, akuntabel dan kesamaan hak serta dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI SP2HP

Program ini bertujuan memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana melalui pemberian SP2HP sejak tahanan penerimaan penilaian laporan, tahap penyelidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

TRANSPARANSI REKRUITMEN ANGGOTA POLRI (AKPOL, PPSS, BINTARA)

Program ini bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui kegiatan rekrutmen anggota Polri yang dilaksanakan secara bersih (tanpa KKN dan suap), transparan (terbuka melalui pengawasan internal dan eksternal), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan humanis (memperlakukan peserta seleksi secara manusiawi.

APLIKASI SETIAP PROGRAM UNGGULAN

- Ren dan pelaksanaan yang tepat
- Setiap tindakan sesuai dengan SOP
- Dilaksanakan oleh anggota yang terlatih (profesional)
- Penanggung jawab yang terstruktur
- Ada standar waktu yang jelas
- Terikat dengan asas, prinsip dan standar pelayanan prima
- Indikator keberhasilan dapat dan mudah diukur
- Ada komitmen semua pihak
- Dukungan sarpras, matlog dan anggaran serta administrasi.
- Pengawasan secara berjenjang dan terus menerus.

PROGRAM UNGGULAN INI DISEBUT :

QTAP ACTIONS (Quick, Transparans, Akuntabel And

Professional Actions)

CEPAT DAN TEPAT:

- Cepat tepat dalam setiap tindakan
- Cepat tanggap merespon (sensitif) setiap setiap persoalan dan perkembangan situasi kamtibmas
- Ada kontak person polisi dengan masyarakat
- Tidak berbelit-belit berurusan dengan masyarakat
- Mudah menemui polisi saat masyarakat perlu
- Kesiediaan Polisi untuk menolong masyarakat yang butuh
- Tidak diskriminatif
- Kreatif/ inovatif

TRANSPARANSI:

- Ada akses masyarakat untuk mendapatkan informasi (IT)
- Kesiediaan untuk terima kritik dan masukan (jangan kontra produktif)
- Kesiediaan/ kesiapan untuk berubah kearah yang lebih baik
- Komunikasi lebih terbuka sesuai kewajaran
- Tidak diskriminatif

AKUNTABELITAS:

- Internal:-Memenuhi SOP yang ada dalam bertindak
- Penguasaan taktik dan teknis secara benar
- Dileengkapi dengan administrasi pendukung
- Eksternal:- Legalitas (aspek hukum)
- Legaltimate (aspek ipolekbud kam)

PROFESIONAL:

- Mempunyai jenjang pendidikan
- Menguasai bidang tugasnya (mahir dan trampil baik taktis maupun teknis)
- Cara berfikir terstruktur dan sistematis
- Komunikasi menyenangkan
- Mempunyai mutu kinerja yang berkualitas
- Memenuhi standar aturan moral dan perpu

KESIMPULAN

Kebijakan Quik Win dapat dijadikan katalisator untuk melakukan reformasi birokrasi polri dalam rangka mewujudkan pelayanan prima sehingga masyarakat semakin mempercayai polri.

REKOMENDASI

- Quick Win harus dikembangkan/ dijabarkan di seluruh fungsi Opsnal dan pembinaan Polri
- Perlu segera disosialisasikan kepada seluruh anggota Polri dan stakeholder/masyarakat
- Perlu pemenuhan kebutuhan sarpras, matlog dan duk opsnal
- Perlu adanya komitmen yang kuat bagi semua pihak untuk mewujudkan layanan prima dalam setiap kegiatan kepolisian
- Diperlukan tim asistensi dan pengawas pelaksanaan program.